

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab sosial bukan lagi bersifat sukarela (*voluntary*), melainkan merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*) yang melekat pada entitas korporasi. Secara normatif, regulasi tersebut mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan dari orientasi semata-mata pada pertumbuhan ekonomi menuju model pembangunan berkelanjutan yang menempatkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai fondasi utama. Dengan demikian, implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan nilai jangka panjang (*long-term value creation*) bagi perusahaan dan masyarakat.

Dalam konteks perusahaan milik negara yang bergerak di sektor ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) memiliki posisi strategis karena aktivitas operasionalnya bersinggungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam, infrastruktur publik, serta kepentingan masyarakat luas. Sebagai penyedia energi listrik nasional, PT PLN tidak hanya memikul tanggung jawab ekonomi dalam menjamin ketersediaan dan keandalan pasokan listrik, tetapi juga tanggung jawab sosial dan ekologis atas dampak operasionalnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT PLN menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sekaligus manifestasi komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.

PT PLN mengintegrasikan pelaksanaan TJSL dengan kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Implementasi tersebut diwujudkan melalui empat pilar utama yang saling terhubung, yakni pilar ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Pilar ekonomi diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui penguatan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta penciptaan peluang ekonomi berbasis komunitas. Pilar sosial berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan kelompok rentan. Pilar lingkungan diwujudkan melalui program pelestarian lingkungan, pengurangan emisi, serta pengelolaan energi yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, pilar tata kelola menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Kenyataannya PT PLN dijalankan melalui pendekatan *Community Involvement and Development* (CID), yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra pembangunan. Pendekatan ini menekankan pada partisipasi aktif komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga tercipta rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dan keberlanjutan hasil program. Melalui skema tersebut, program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR) tidak hanya bersifat karitatif atau jangka pendek, tetapi diarahkan pada transformasi sosial yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Kemudian pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan yang terencana dan terintegrasi memiliki implikasi strategis bagi perusahaan. Secara eksternal, program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR) berkontribusi pada peningkatan reputasi korporasi, penguatan legitimasi sosial (*social license to operate*), serta harmonisasi hubungan dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan mitra usaha. Secara internal, implementasi TJSL yang efektif dapat memperkuat budaya organisasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab etis. Dengan demikian, Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR) tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi strategi korporasi dalam membangun daya saing dan nilai perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

PT PLN (Persero) adalah perusahaan yang beroperasi di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan memiliki tugas untuk menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR) yang mencakup berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR) untuk pendidikan, hal ini tidak hanya menyediakan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan mutu hidup, tetapi juga berinvestasi dalam kemajuan ekonomi dan sosial negara dalam jangka panjang sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 mendatang. Pendidikan merupakan salah satu fondasi yang sangat penting untuk pembangunan bangsa. Pendidikan memengaruhi ekonomi, kebudayaan, rangkaian ideologi, dan kualitas masyarakat. (Pristiwanti dkk, 2022) Pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, tetapi masih menghadapi banyak masalah. Pendidikan Indonesia menghadapi banyak masalah, mulai dari keterbatasan akses hingga kualitas pendidikan yang tidak merata. Pendidikan merupakan proses yang dirancang dan dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan individu.. Menurut Primasti (2021), pendidikan adalah alat penting untuk mengubah cara masyarakat dan individu berpikir dan bertindak berdasarkan prinsip keberlanjutan. Setiap orang dapat dipersiapkan untuk dapat beroperasi dalam masyarakat dengan bantuan pendidikan (Pratomo et al., 2021). Sasaran pendidikan di Indonesia, atau pendidikan secara keseluruhan, adalah menciptakan individu yang cerdas, berbudi pekerti baik, inovatif, memiliki visi, dan mampu menjadi warga negara yang baik.

Diharapkan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dapat melahirkan generasi dengan pola pikir ramah lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena dapat berkontribusi pada kemajuan nasional secara keseluruhan, serta efektivitas dan infrastruktur masyarakat (Pribadi, 2017). Akibatnya, sumber daya manusia memperoleh wawasan yang lebih cepat dan lebih siap menghadapi perubahan yang timbul dari pendidikan secara umum atau proses belajar di mana pun. Saat ini,

pemerintah terus berupaya menyediakan program pendidikan berkualitas tinggi (Nurfatimah dkk., 2022).

Menurut Istiawati (2016), sekolah sangat terlibat dalam pemilihan pendekatan terbaik untuk menerapkan nilai-nilai mereka sebagai pusat pengembangan SDM. Banyak jenis sekolah di Indonesia, termasuk sekolah umum atau reguler, yang menawarkan pendidikan tingkat dasar hingga menengah atas dengan tujuan membantu siswa memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Setiap jenis sekolah memiliki karakteristik dan kurikulum yang unik untuk mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia, yang mengarah pada pembentukan jenis sekolah lainnya. Sekolah Luar Biasa (SLB), juga dikenal sebagai sekolah khusus atau sekolah berkebutuhan khusus, membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus, seperti tunanetra, tunarugu, tunagrahita, tundaksa, tunalaras, autisme, atau masalah lainnya, berkembang menjadi individu yang mandiri sesuai dengan potensi mereka.

Saat ini Indonesia juga membentuk sebuah pendidikan baru yaitu sekolah inklusi, sekolah inklusi merupakan, Jenis sekolah ini memungkinkan anak umum dan Namun, sekolah berkebutuhan khusus akan sangat berbeda dari sekolah umumnya jika difokuskan pada mereka. Meskipun ada upaya yang dilakukan untuk menyediakan pendidikan yang memadai bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, institusi pendidikan yang difokuskan pada kebutuhan tersebut sering kali menghadapi tantangan seperti keterbatasan jumlah pengajar yang mampu memberikan bimbingan khusus, kurangnya perhatian secara personal, serta kurangnya sarana yang diperlukan untuk menyampaikan pendidikan yang selaras dengan kemajuan zaman.

Hal ini mengakibatkan rendahnya keterampilan yang dapat menghambat anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk keluar dari lingkaran pengetahuan dan keterampilan yang minim, serta mengejar ketertinggalan dengan kemampuan anak-anak pada umumnya. Meskipun pemerintah dan berbagai organisasi sosial secara aktif mempromosikan nilai pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang bersekolah di sekolah khusus, implementasi di lapangan masih menunjukkan banyak perbedaan. Tanpa memandang latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi keluarga, setiap

anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sebagaimana ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional maupun kajian akademik (Suardipa, 2019). Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai instrumen strategis dalam membentuk kapasitas individu, mengembangkan potensi, serta menjamin partisipasi sosial yang setara di masa depan. Dalam perspektif pembangunan manusia, anak merupakan aset dan investasi jangka panjang bangsa, karena kualitas sumber daya manusia suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diterima sejak usia dini.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak yang menempuh pendidikan di sekolah khusus, termasuk anak dengan kebutuhan khusus sering kali belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam sistem pendidikan nasional. Keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya tenaga pendidik dengan kompetensi khusus, serta minimnya dukungan anggaran menjadi tantangan struktural yang masih dihadapi oleh banyak lembaga pendidikan khusus. Kondisi ini mengakibatkan adanya kesenjangan fasilitas dan layanan pendidikan jika dibandingkan dengan sekolah reguler, sehingga hak atas pendidikan yang setara belum sepenuhnya terwujud secara substantif.

Keterbatasan dana operasional yang dialokasikan bagi sekolah khusus turut memperberat beban pengelola dalam menyediakan lingkungan belajar yang layak, aman, dan inklusif. Fasilitas pendukung seperti alat bantu pembelajaran adaptif, ruang terapi, aksesibilitas fisik, serta program pengembangan kapasitas guru sering kali tidak tersedia secara optimal akibat kendala pembiayaan. Padahal, penyediaan fasilitas yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus bukan sekadar pelengkap, melainkan prasyarat utama untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individual peserta didik.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus memiliki signifikansi strategis dalam memutus rantai ketidaksetaraan sosial. Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan dapat membuka

peluang partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sekaligus memperkuat integrasi mereka dalam masyarakat. Dengan demikian, investasi pada pendidikan anak berkebutuhan khusus bukan hanya tanggung jawab moral dan konstitusional negara, tetapi juga langkah konkret dalam membangun fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial..

Perkembangan zaman yang ditandai oleh revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Digitalisasi tidak lagi dipandang sebagai inovasi tambahan, melainkan sebagai kebutuhan struktural yang memengaruhi pola interaksi, metode pembelajaran, serta sistem pengelolaan pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, digitalisasi pendidikan merupakan konsekuensi logis dari kemajuan teknologi yang menuntut adaptasi dalam penguasaan literasi digital, kompetensi teknologi, dan akses terhadap sumber belajar berbasis daring (Dewanti, 2020). Transformasi tersebut menuntut institusi pendidikan untuk beralih dari model pembelajaran konvensional menuju model pembelajaran yang lebih fleksibel, interaktif, dan berbasis teknologi.

Digitalisasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru (*teacher-centered learning*) secara bertahap bergeser menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), dengan memanfaatkan platform digital sebagai medium interaksi, kolaborasi, dan eksplorasi pengetahuan. Dalam konteks ini, penguasaan teknologi menjadi prasyarat penting, baik bagi pendidik maupun peserta didik, agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan adaptif terhadap dinamika perkembangan zaman.

Sebagai respons terhadap perubahan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah strategis melalui penerbitan kebijakan terkait digitalisasi sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pembelajaran berbasis teknologi dengan

menyediakan akses terhadap bahan ajar digital bagi siswa, guru, dan orang tua. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 (Dewanti, 2020), yang secara substantif menekankan pentingnya pemanfaatan perangkat teknologi informasi, seperti komputer, tablet, serta platform pembelajaran daring sebagai bagian dari dukungan operasional institusi pendidikan.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemanfaatan perangkat digital tidak hanya dimaksudkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi administrasi sekolah, memperluas akses terhadap sumber belajar, serta mendorong kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Dengan demikian, digitalisasi sekolah menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional, sekaligus menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi digital yang relevan dengan tuntutan era globalisasi dan transformasi teknologi. Namun kenyataan yang ada, berdasarkan data yang diperoleh dari Portal Data Pendidikan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 proporsi Sekolah Luar Biasa atau Sekolah Berkebutuhan Khusus pada provinsi Banten hanya mencapai 10.71%. Sekolah Khusus An-Nur merupakan bagian dari jumlah tersebut. Hal ini diperkuat oleh observasi langsung dan didapatkan informasi bahwa Sekolah Berkebutuhan Khusus An-Nur yang berdiri sejak 2019 berlokasi di Ciputat Tangerang Selatan hanya memiliki 1 perangkat komputer yang dapat digunakan untuk administrasi serta proses pembelajaran dalam mata pelajaran Teknologi dan Informatika untuk anak berkebutuhan khusus. Angka ini menandakan bahwa sebagian besar sekolah berkebutuhan khusus di wilayah tersebut belum memiliki sarana teknologi dasar yang mendukung pembelajaran berbasis digital.

Preview Proposal SLB yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran  
Semua Wilayah - 2024 - Semua Jenjang

No	Kode Kemendagri	Kode BPS	Provinsi	Status Sertasi Pendidikan		Total
				Negeri	Suasta	
1	11	11	Aceh	10.00	16.77	13.84
2	12	12	Bangka Belitung	10.34	16.13	13.33
3	13	13	Bengkulu	34.48	13.01	16.57
4	14	14	Bali	27.78	13.23	18.55
5	15	15	Banjar	18.75	12.50	16.67
6	16	16	Banten	25.00	4.25	12.87
7	17	17	Bengkulu	20.00	33.23	22.22
8	18	18	Lampung	23.68	5.34	12.80
9	19	19	Kepulauan Bangka Belitung	71.41	0.00	53.58
10	21	21	Kepulauan Riau	66.00	6.53	31.82
11	31	31	DKI Jakarta	7.60	24.60	22.00
12	32	32	Jawa Barat	42.86	12.58	16.80
13	33	33	Jawa Tengah	30.02	24.49	23.66
14	34	34	DI Yogyakarta	77.78	20.83	27.16
15	35	35	Jawa Timur	12.49	19.28	13.84
16	40	40	Irian Jaya	63.33	6.74	10.71
17	51	51	Bali	75.00	10.00	21.43
18	52	52	Nusa Tenggara Barat	28.57	7.88	11.82
19	53	53	Nusa Tenggara Timur	30.00	16.36	23.91
20	61	61	Kalimantan Barat	13.73	18.18	13.58
21	62	62	Kalimantan Tengah	40.00	20.00	26.60

Gambar 1.1 Data Jumlah SLB dan Kepemilikan Fasilitas Teknologi, Portal Pendidikan, 2004

Data ini berbanding terbalik dengan data jumlah fasilitas teknologi pada sekolah umum. Difokuskan pada salah satu provinsi yaitu Provinsi Banten angka sekolah yang memiliki fasilitas komputer tersebut mencapai 95.54%. Hal ini menggambarkan bahwa adanya ketidakmertaan serta kesenjangan yang terjadi pada sekolah berkebutuhan khusus dengan sekolah umum.

1. Proposal Sekolah Luar Biasa (SLB) yang Memiliki Fasilitas Komputer untuk Tujuan Pengajaran berdasarkan Wilayah dan Status Sertasi Pendidikan, Tahun 2023

No	Kode Kemendagri	Kode BPS	Provinsi	Status Sertasi Pendidikan		Total
				Negeri	Suasta	
1	11	11	Aceh	10.00	16.77	13.84
2	12	12	Bangka Belitung	10.34	16.13	13.33
3	13	13	Bengkulu	34.48	13.01	16.57
4	14	14	Bali	27.78	13.23	18.55
5	15	15	Banjar	18.75	12.50	16.67
6	16	16	Banten	25.00	4.25	12.87
7	17	17	Bengkulu	20.00	33.23	22.22
8	18	18	Lampung	23.68	5.34	12.80
9	19	19	Kepulauan Bangka Belitung	71.41	0.00	53.58
10	21	21	Kepulauan Riau	66.00	6.53	31.82
11	31	31	DKI Jakarta	7.60	24.60	22.00
12	32	32	Jawa Barat	42.86	12.58	16.80
13	33	33	Jawa Tengah	30.02	24.49	23.66
14	34	34	DI Yogyakarta	77.78	20.83	27.16
15	35	35	Jawa Timur	12.49	19.28	13.84
16	40	40	Irian Jaya	63.33	6.74	10.71
17	51	51	Bali	75.00	10.00	21.43
18	52	52	Nusa Tenggara Barat	28.57	7.88	11.82
19	53	53	Nusa Tenggara Timur	30.00	16.36	23.91
20	61	61	Kalimantan Barat	13.73	18.18	13.58
21	62	62	Kalimantan Tengah	40.00	20.00	26.60

Gambar 1.2 Jumlah Data Sekolah Umum Seluruh Indonesia Yang Memiliki Fasilitas Komputer  
Sumber Portal Data Pendidikan, 2025

Dalam konteks pembangunan sosial yang berkelanjutan, perusahaan tidak lagi diposisikan semata sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada profit, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Melalui implementasi Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR), perusahaan berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat yang rentan, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Intervensi sosial tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui pemberian akses terhadap pendidikan, fasilitas pendukung, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR) berfungsi sebagai instrumen redistribusi sosial yang konkret dalam mendorong pemerataan kesempatan pendidikan.

Sekolah Khusus An-Nur sebagai lembaga pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi tenaga pendidik maupun sarana prasarana. Dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 6 orang untuk melayani sekitar 40 peserta didik dengan kategori anak autisme serta tunawicara dari berbagai jenjang pendidikan, sekolah ini berupaya menjalankan fungsi pendidikan inklusif dalam kondisi yang terbatas. Keterbatasan fasilitas pembelajaran adaptif, perangkat teknologi pendukung, serta akses terhadap pelatihan profesional bagi guru berpotensi menghambat optimalisasi proses pembelajaran. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya kesempatan peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang setara secara kualitas dengan sekolah reguler, khususnya dalam konteks integrasi teknologi pembelajaran.

Dalam era transformasi digital yang menuntut integrasi teknologi dalam sistem pendidikan, sekolah berkebutuhan khusus menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan sekolah umum. Digitalisasi pendidikan bukan sekadar pengadaan perangkat teknologi, melainkan mencakup kesiapan infrastruktur, kompetensi tenaga pendidik, serta adaptasi metode pembelajaran sesuai karakteristik anak berkebutuhan khusus. Tanpa intervensi yang memadai, kesenjangan digital (*digital divide*) berpotensi semakin memperlebar ketimpangan akses pendidikan antara anak berkebutuhan khusus dan peserta didik lainnya.

Secara geografis Sekolah Berkebutuhan Khusus merupakan sekolah yang dilalui oleh asset sutet oleh PT PLN UPT Gandul. Berdasarkan latar belakang tersebut, intervensi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR) oleh PT PLN UPT Gandul menjadi relevan dan strategis. Dukungan perusahaan tidak hanya

berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi sebagai upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekolah dalam mengimplementasikan digitalisasi pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana strategi program CSR yang dirancang dan diimplementasikan oleh PT PLN UPT Gandul, serta sejauh mana tanggung jawab sosial tersebut berdampak pada peningkatan digitalisasi pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Khusus An-Nur Ciputat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas sinergi antara sektor korporasi dan lembaga pendidikan khusus dalam menciptakan akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam pengembangan model CSR yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi transformatif dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung digitalisasi pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Seperti yang telah dipaparkan pada uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas mengenai “Strategi Tanggung Jawab Sosial PT PLN UPT Gandul Dalam Meningkatkan Digitalisasi Sekolah Berkebutuhan Khusus (Studi Sekolah Berkebutuhan Khusus An-Nur Ciputat)” dengan batasan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR) PT PLN UPT Gandul dalam meningkatkan digitalisasi sekolah berkebutuhan khusus?
2. Bagaimana program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR) PT PLN UPT Gandul berdampak pada peningkatan digitalisasi sekolah berkebutuhan khusus?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta penjelasan mengenai rumusan masalah, maka fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR) dari PT PLN UPT Gandul dalam meningkatkan digitalisasi sekolah berkebutuhan khusus
2. Untuk mengetahui dampak program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR) dari PT PLN UPT Gandul pada peningkatan digitalisasi pendidikan pada Sekolah Berkebutuhan Khusus An-Nur Ciputat

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan oleh penulis, maka penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai fungsi bantuan sosial dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bantuan dari sektor swasta, dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), berperan sebagai alat sosial dalam mendukung kelompok rentan, terutama anak-anak dengan kebutuhan khusus. Penelitian ini didasarkan pada apa yang telah dipelajari dalam mata kuliah *Public Relations* dan Manajemen CSR.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Universitas Nasional, terutama dalam Program Studi Ilmu Komunikasi sebagai sumber referensi dalam penelitian mengenai implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR) khususnya dalam bidang pendidikan sekolah berkebutuhan khusus, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan penelitian di masa mendatang.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk dapat mempermudah dan memperjelas penelitian skripsi ini maka dari itu penulis membuat sistematika penulisan penelitian sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dalam bab ini juga dijelaskan sistematika penulisan dari penelitian yang berjudul “Strategi Tanggung Jawab Sosial PT PLN UPT Gandul Dalam Meningkatkan Digitalisasi Pendidikan Sekolah Berkebutuhan Khusus (Studi Sekolah Berkebutuhan Khusus An-Nur Ciputat)”.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Tinjauan literatur ini akan diberikan dalam bab ini. Ini akan mencakup deskripsi penelitian, definisi, dan kerangka penelitian penulis, serta studi pustaka atau teori pendukung lainnya.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memberikan penjelasan tentang metodologi penelitian dan penentuan informan, subjek, objek, dan lokasi penelitian. Ini juga mencakup metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta metode validasi data.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, hasil penelitian disajikan dalam bentuk data kualitatif. Selanjutnya, hasil-hasil ini dianalisis, ditafsirkan, dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan atau penelitian sebelumnya. Bab ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bab sebelumnya dengan memaparkan formulasi masalah. Bagian ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana temuan dari formulasi masalah dapat membantu kita memahami lebih baik subjek yang diteliti.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memberikan gambaran tentang kontribusi penelitian dan saran untuk pengembangan. Pada bagian kesimpulan, makalah ini menjelaskan temuan utama

penelitian, menjawab pertanyaan penelitian, dan menyimpulkan bahwa tujuan penelitian telah dicapai. Bagian ini juga memberikan jawaban pertanyaan penelitian secara ringkas dan jelas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka dalam skripsi adalah kumpulan referensi yang digunakan oleh peneliti untuk memperluas dan mendukung topik penelitian mereka. Sumber-sumber ini dapat mencakup buku, jurnal, artikel, laporan, tesis, disertasi, atau jenis sumber lain yang terkait dengan topik penelitian.

